

P ISSN 2715-8853

Islamic Economics and Business Journal

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PERUSAHAAN
BERLANDASKAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENCIPTAKAN PEREKONOMIAN
BERKEADILAN

Masyhuri

PENGARUH PERILAKU ORGANISASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
AS'ADIYAH SENGKANG

Jumriani

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA NEW NORMAL

Shadnyah

NILAI KEARIFAN LOKAL PALLISE' BALU'
PADA PEDAGANG BUGIS DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

Musrini Muis

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR PADA USAHA KONVEKSI DAN
SABUN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Majatul Isnaen Rusyaid

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS

Milani

VOL. 2 NO. 1 JUNI 2020



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PERUSAHAAN
BERLANDASKAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENCIPTAKAN
PEREKONOMIAN BERKEADILAN**

Masyhuri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Akuntansi syariah dianggap sebagai wacana baru dalam ilmu yang menyatakan konsistensi akuntansi untuk tujuan akuntansi sebagai media akuntabilitas. Paper ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk akuntabilitas dengan menggunakan perspektif maqashid syariah dan bagaimana implementasi praktik akuntabilitas dalam entitas. paper ini menetapkan tiga model berlapis yaitu teori perusahaan syariah, teori agensi dan informasi Asimetri, dan teori keadilan dalam filsafat dalam hukum Islam. Akuntabilitas yang mendasari perspektif maqashid syari'ah akan mampu menciptakan rasa keadilan karena mempersepsikan kehidupan spiritual dan kehidupan akhirat.

Keywords : *Akuntabilitas, Maqashid syari'ah, Justify, Shari'ah enterprise theory (SET)*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya akuntansi konvensional berasal dari “pandangan alam” materialis barat, sehingga segala bentuk penilaian mengukur segala sesuatu dari segi materi dan menafikkan segala yang berada di luar dari itu dalam hal ini aspek non-material seperti spiritual dan jiwa. Pandangan materialis barat ini telah membawa jiwa kapitalisme dalam diri akuntansi yang cenderung memarjinalkan *altruistic* dan melanggengkan *egoistic* (Triyuwono, 2006. Hal 43). Sehingga tidak heran jika secara teoritis maupun praktik akuntansi konvensional sarat dengan nilai-nilai kapitalistik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Murthada Muthahari (2001, hal

11) bahwa ideologi manusia terbentuk dari pandangan apa pun yang kita miliki tentang alam ini. Dan sebagaimana dipahami landasan epistemologi akuntansi konvensional pun berasal dari pandangan materialis barat.

Tidak dapat dipungkiri geliat kapitalisme telah merambah dan menjerat setiap penjuru dan sudut kehidupan manusia. Akuntansi juga tak terlepas dari pengaruh ini. Ia tidak lebih sebagai alat yang digunakan untuk lebih memperkuat kekuatan kapitalisme. Akuntansi bahkan menjadi senjata bagi para pemilik modal untuk mengkalkulasi modal dan semakin meningkatkan kesejahteraannya dalam hal materi. Sistem kapitalisme ini telah membentuk perekonomian yang tidak berkeadilan dan tujuan maqashid syariah tidak dapat tercapai.

Hadirnya akuntansi syariah hendaknya menjadi jawaban dan solusi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul atas konsep yang diterapkan oleh akuntansi konvensional yang mengedepankan egoisme. Islam sebagai basis ideologi memiliki peran penting dalam menciptakan akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran sehingga menjadi *mainstream* tersendiri atas sistem yang mapan (Ruslan, 2013).

Proses dekonstruksi dari akuntansi konvensional ke akuntansi syariah bukanlah perkara mudah mengingat akuntansi konvensional lahir dari sebuah ideologi barat yang telah tertanam sejak dulu dan memiliki kuasa yang luas dan hingga saat ini masih tetap bertahan sebagai sistem yang mengikat sebagian besar negara. Bahkan kapitalisme akan terus melakukan evolusi untuk bisa tetap mempertahankan eksistensi dalam menguasai dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl Marx bahwa satu-satunya hal yang paling dia kagumi dari kapitalisme adalah kemampuannya untuk terus melakukan evolusi diri. Hal inilah yang hendak dijawab akuntansi syariah bagaimana mendekonstruksi akuntansi yang selama ini sarat dengan nilai kapitalistik sehingga terbentuk jiwa akuntansi yang spiritual yang mana akuntansi menurut Djamhuri (2011) selama ini ditempatkan lebih pada tataran praktis yang berimplikasi akuntansi menjadi terkungkung dan semata-mata ditempatkan dalam kerangkeng besi tujuan pengambilan keputusan yang derajat kenalarannya hanya disandarkan pada kepentingan stockholder dan kreditur.

Sementara akuntansi mestinya dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban tidak hanya kepada stockholder tapi lebih jauh pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Akuntansi sebagai disiplin ilmu yang dibentuk dan membentuk lingkungannya harus dibangun di atas pondasi yang berlandaskan pada Al Quran dan Hadis agar kemashlahatan dunia akhirat yang menjadi cita-cita syariat dapat tercapai. Akuntansi konvensional selama ini identik dengan akuntabilitas terhadap stockholder sehingga motif utamanya adalah laba (keuntungan ekonomis) dan menjadikan materi sebagai satu-satunya tolak ukur bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap stockholder yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi alat bagi para pelaku bisnis untuk melakukan pertanggungjawaban. Akibatnya laporan keuangan bisa saja dimodifikasi seindah mungkin guna menarik perhatian para stockholder sebagai representasi keberhasilan dari hubungan akuntabilitas (Djamhuri, 2011).

Menurut Hidayat (2004) dalam Permatasari dan Dewi (2011) bahwa akuntansi syariah dapat menjadi alternative dari permasalahan akuntabilitas akuntansi konvensional yang masih mengabaikan aspek non-materi yang sebagaimana dinyatakan oleh Djamhuri (2011) bahwa penggunaan laporan keuangan konvensional sebagai laporan akuntabilitas utama dapat menimbulkan distorsi informasi, suatu keadaan dimana informasi akuntansi tidak sepenuhnya mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Pernyataan itu timbul dari prinsip yang dipegang oleh akuntansi islam. Prinsip tersebut adalah bahwa akuntansi islam harus mengedepankan pertanggungjawaban kepada Allah SWT karena secara logika ketika perusahaan mengedepankan tanggungjawab kepada Allah SWT, maka secara otomatis mereka akan bertanggungjawab kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Munculnya berbagai organisasi yang berlabelkan syariah merupakan pertanda baik, namun hal yang perlu menjadi perhatian apakah praktek penyelenggaraan akuntansi syariah sudah sesuai dengan syari'ah sebagaimana yang terkandung dalam Alquran dan Hadis ataukah akuntansi syariah yang ada saat ini sebagaimana diungkapkan oleh Ruslan (2013) hanya topeng bagi kapitalisme sebagai bentuk

evolusi melalui kapitalisasi agama yang dilakukan untuk meredamkan dan memenangkan pertarungan ideologinya yang mulai terancam.

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terutama kepada Tuhan merupakan aspek penting dalam menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan menggapai kemashlahatan. Maqashid syariah sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai menganggap pentingnya akuntabilitas keTuhanan terutama dalam akuntansi syariah agar tercipta keadilan, kesejahteraan holistik serta kemashlahatan bagi seluruh umat (Mulawarman, 2007).

Baydoun and Willett (2000) dalam (Sulaiman, 2003) mengatakan bahwa konsep pertanggung jawaban dan akuntabilitas dalam islam dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan pada masyarakat dengan prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) dan akuntabilitas sosial (social accountability). Akuntabilitas dalam cakupan yang lebih luas pada dasarnya digunakan untuk memberikan pengaruh yang positif dalam menjalankan tanggungjawab sebagai bentuk kesediaan untuk bertindak dengan cara yang benar dan senantiasa bersikap jujur. Nilai-nilai islam mempunyai konsep akuntabilitas yang lebih efektif dalam menjalankan tanggungjawab yaitu pertama, akuntabilitas kepada Tuhan selama di dunia, kedua akuntabilitas kepada Tuhan di akhirat dan ketiga akuntabilitas kepada manusia. (Abbasi, Rehman, dan Bibi. 2010). Melalui pendekatan ini, maka setiap tindakan yang dilakukan akan selalu mempertimbangan akan kehadiran Tuhan. Begitu pun dalam pengungkapan dan akuntabilitas sosial semua tindakan tidak hanya didasarkan pada kepentingan stakeholder tapi ada kesadaran untuk mendasari perbuatannya bahwa akan membawa pengaruh yang besar tidak hanya untuk di dunia tapi di akhirat.

Maqashid syariah atau biasa disebut dengan filsafat hukum islam merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan hukum islam terhadap suatu persoalan dengan mengumpulkan berbagai *nash* yang mempunyai maksud yang sama dan kemudian menarik kesimpulan dari nash-nash yang telah dikumpulkan tersebut. Dalam hal ini tulisan ini mencoba menemukan pandangan islam khususnya terhadap konsep akuntabilitas dalam akuntansi konvensional yang dituangkan dalam laporan keuangan yang tak jarang melakukan *creative accounting* agar menarik para pengguna lain.

Maqashid Syariah sebagaimana menurut Illal Al-Fasi dalam Anshori (2009) adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Syariah dan Rahasia-rahasia di balik ketetapan dalam hukum Syariah. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat tema “**Implementasi Akuntabilitas perusahaan berlandaskan Maqashid Syariah dalam Menciptakan Perekonomian Berkeadilan**” untuk melahirkan konsep kebijakan akuntabilitas perusahaan yang berbasis pada pendekatan maqashid syariah demi memaksimalkan fungsi dan peran perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan tercipta perekonomian yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan ingin menjawab permasalahan di bawah:

1. Bagaimana konsep akuntabilitas berlandaskan maqashid syariah?
2. Bagaimana implementasi akuntabilitas berlandaskan maqashid syariah dalam aktivitas perusahaan khususnya badan usaha islam?

II. Tinjauan Pustaka dan Pembahasan

Terdapat tiga teori yang mendasari tulisan ini, yaitu *Shari'ah Enterprise Theory* (SET), *Agency Theori* dan *Asymetri Informasi*, dan *Teori keadilan dalam filsafat hukum islam*.

A. Shari'ah Enterprise Theory

SET (Shari'ah Enterprise Theory) yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan Entity Theory. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2011, Hal 354). Bentuk akuntabilitas ini akan menciptakan kesadaran keTuhanan karena pertanggungjawaban dilakukan sebagai bentuk rasa tanggungjawab yang tinggi kepada Tuhan sebagai *khalifatullah fil ardh*.

SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi adalah pengakuan income dalam bentuk nilai tambah, bukan income dalam pengertian laba yang dikapitalisasi dalam bentuk materi. SET yang dikembangkan berdasarkan metafora Zakat ini pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan (Triyuwono, 2011). Karakter keseimbangan itu adalah keseimbangan antara *egoistic* dan *altruistic*. Konsekuensi

dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga pada pihak lainnya, yaitu kepedulian terhadap stakeholder yang lebih luas yang meliputi Tuhan, Manusia dan alam.

Menurut SET, Tuhan merupakan pelanggan tertinggi dan satu-satunya tujuan hidup manusia. Sehingga pertanggungjawaban (akuntabilitas) perusahaan terhadap Tuhan ini sebagai tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran kesadaran keTuhanan”. Dengan menjadikan Tuhan sebagai stakeholder utama maka secara otomatis pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dan alam akan terwujud.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang oleh Triyuwono (2011) dibedakan menjadi dua yaitu *Direct-Stakeholders* (pihak yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perusahaan baik dalam bentuk financial maupun no-financial) dan *Indirect-Stakeholders* (pihak yang tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan). Akuntabilitas terhadap manusia ini dapat menciptakan kesejahteraan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau pun dieksploitasi.

Golongan stakeholder terakhir SET adalah alam. Alam memberikan kontribusi yang besar bagi keberlangsungan perusahaan. Karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam dan semua disediakan oleh alam.

B. Teori Agensi dan Asimetri Informasi

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. *Agency theory* mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) (Halim, Julia dkk., 2005:120).

Scott (2000) menyatakan bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection* adalah para manajer serta orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor sebagai pihak luar dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

C. Teori keadilan dalam filsafat hukum Islam

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang, menurut Mu`tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung (Fanani). Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai-nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia, dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan universal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan

dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan:

“Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah. Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan teistis menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu (umat religius) Kami berikan aturan dan jalan (tingkah laku). Apabila Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (berdasarkan pada aturan dan jalan itu), tetapi, (ia tidak melakukan demikian). Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Oleh karena itu, berlomba-lombalah (yaitu, bersaing satu samalain) dalam berbuat baik. Karena Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu Ia akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) mengenai apa yang kamu perselisihkan itu.”

Terhadap suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, yang diakui secara

obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang idael disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna. Bahkan,

“barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat baik, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Jelaslah, disini kita mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan antara keadilan obyektif dan teistis, dimana keadilan obyektif diperkuat lagi oleh tindakan-religius kepatuhan kepada Allah. Dalam bidang keadilan obyektif universal, manusia di perlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab yang sama untuk menjawab bimbingan universal. Lagi pula, tanggung jawab moral asasiyah semua manusia pada tingkat bimbingan universal inilah yang membuatnya masuk akal untuk mengatakan bahwa Al-Quran menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang merupakan sumber keadilan positif dalam masyarakat yang berdasarkan persetujuan yang tak di ucapkan atau oleh tindakan resmi. Alim-alim tersebut berpendapat bahwa keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari wahyu islam, yang diungkapkan dalam bentuk awalnya dalam hukum-hukum islam yang suci (syari`ah).

D. Pembahasan

1. Akuntabilitas dalam pandangan islam

Islam memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Sementara Agency theory yang menjadi kerangka pikir akuntabilitas seperti saat ini sarat dengan nilai egois dan materialistik, bersifat kuantitatif dan dibelenggu dengan system kapitalis. Nilai egois dan materialistik dimunculkan dari adanya asumsi dasar dari teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisehardt, yaitu manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, adanya konflik antar organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, adanya kesenjangan informasi antara principal dan agent, serta informasi dipandang sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Pemisahan pemilik (pemegang saham) dan manajemen, dalam literatur akuntansi dikenal sebagai *agency theory* yang melihat

hubungan berdasarkan konsep *principal* dan *agent* (Harahap , 2005). Akuntabilitas sebagai persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja serta membaiknya citra perusahaan (Isgiyarta dan Tristiarini, 2005) dalam (Kurniawati, 2011)

Sifat egois dan materialistik diekspresikan dengan jelas pada tindakan manajemen dalam menggunakan akuntansi (laporan keuangan) sebagai alat untuk melakukan rekayasa dan akuntabilitas menjadi pemberian informasi (laporan keuangan) terhadap kepentingan (ego) pemilik modal (*shareholders*) untuk mendapatkan informasi besarnya laba yang menjadi haknya. Sementara pihak di luar pemilik modal seakan-akan tidak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan, sehingga tidak perlu pemberian informasi (Kholmi, 2012).

Kedua sifat tersebut semakin menguat, karena mendapatkan pembenaran dari nilai utilitarianisme. Utilitarianisme pada dasarnya memiliki anggapan bahwa nilai baik atau buruk dari sebuah perbuatan diukur dengan ada tidaknya utilitas (yang tidak lain adalah materi) yang dihasilkan dari perbuatan tersebut . Sepanjang perbuatan itu menghasilkan utilitas, maka sepanjang itu pula sebuah perbuatan dikatakan baik tanpa sama sekali melihat bagaimana *prosesnya*. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa proses yang dijalankan tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat.

Karakter tersebut bukannya tanpa masalah. Karakter ini mengakibatkan terjadinya dehumanisasi bagi diri manusia itu sendiri. Manusia terperangkap oleh kehidupan yang segalanya diukur oleh materi dan menyeret manusia pada lembah kehidupan kapitalis, bagaikan kehidupan dalam hutan rimba, siapa yang kuat (modal) itulah yang menang. Karakter ini pada akhirnya menjauhkan manusia pada nilai kejujuran dan keadilan, serta menjauhkan manusia dari TuhanNya. Sehingga tidak sedikit seseorang (pemimpin) melakukan eksploitasi, manipulasi, penyelewengan, penyalagunaan wewenang dan jabatan, serta korupsi di bumi

pertiwi ini (Indonesia) hanya untuk mencapai kesenangan di dunia, walaupun berakhir hidup di penjara. Begitulah fakta kehidupan yang kita temukan sekarang.

Hal tersebut dapat memberikan makna, sedikit manusia yang sadar bahwa: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya (Q.S. Al-Muddasir [74]:38). Dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap kepemimpinan itu (Al Had ist, H.R. Tirmidzi, Abu Dawud , Shahih Bu khari d an Muslim). Konsep Islam hadir untuk melakukan perbaikan terhadap suatu kerangka pikir akuntabilitas yang dapat menjadi stimulan bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan, dan bertanggungjawab terhadap TuhanNya, sesama manusia, serta alam.

Dalam perspektif islam, konsep akuntabilitas harus melihat hubungan antara individu dan perusahaan, dengan Tuhan. Konsep ini merupakan perluasan dari konsep dasar islam tentang “Penyatuan dengan Tuhan” (Maali et al., 2006). Dalam islam, semua orang dan pelaku bisnis harus bertanggungjawab kepada Tuhan dan Umma (Islamic society) dengan mengakui kebenaran lain. Setiap muslim harus mengejar keseimbangan yang optimal antara keuntungan dunia dan spiritual, yang tergantung pada tindakannya di dunia (Baydoun and Wilet, 1997). Hal ini berbeda dengan konsep akuntabilitas akuntansi konvensional yang hanya melihat aspek materi sehingga tak heran jika sering terjadi manipulasi dan mark up atas laporan keuangan.

2. Maqashid Syariah dan Anjuran Akuntabilitas dalam islam

Syari'ah islam bukan sekedar bimbingan untuk beribadah (dalam artian kegiatan semata-mata menyembah Allah) tetapi berisi bimbingan dan petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari hal yang dianggap pribadi sampai ke persoalan yang sangat public. Ekonomi, politik, bisnis, social, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan dunia dijelaskan dan terdapat dalam panduan islam.

Tujuan pensyari'atan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemashlahatan serta menolak *mafsadah* (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa Rahmat ke seluruh alam. Sesungguhnya kehadiran Rasul adalah Rahmat bagi manusia karena syari'ah yang dibawa adalah sempurna bagi menjaga kemashlahatan manusia. Apabila

kemashlahatan manusia tidak wujud dengan syari'ah, maka pengutusan Rasul itu tidak menjadi rahmat tetapi merupakan malapetaka kepada manusia.

Menurut Al Ghazali (1322:286) dalam (Yusuf, 2010) pemeliharaan terhadap kehendak syariah meliputi lima dimensi, yaitu: memelihara agama (*al din*), memelihara jiwa (*al nafs*), memelihara akal (*al 'aql*), memelihara keturunan (*al nasl*) dan memelihara kekayaan (*al mal*). Semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan suatu masyarakat haruslah memastikan perlindungan terhadap lima dimensi yang menjadi tujuan dari syariah islam.

Al Syatibi menetapkan pula bahwa pemeliharaan kemashlahatan yang menjadi tujuan syariah tidak semuanya berada pada satu tingkatan. Al syatibi dan al Ghazali membagi kemashlahatan yang ingin dicapai syariah dalam tiga tingkatan. Pertama *al dharurriyah* (*essential*), *al hajiyyah* (*necessary*) dan *al tahsiniyyah* (*luxury*).

Al Dharurriyah adalah perkara-perkara mutlak yang diperlukan untuk membina kehidupan manusia. *Al Hajiyyah* adalah perkara-perkara yang apabila ianya tak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi susah, sedangkan *Al Tahsiniyyah* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan dan dengan keberadaan mashlahah *al tahsiniyyah* kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna.

Secara umum, syari'ah memerhatikan aspek keuntungan bagi individu dan masyarakat, dan hukum-hukum sya'riah tersebut diciptakan untuk melindungi berbagai keuntungan-keuntungan tersebut untuk memudahkan perkembangan dan penyempurnaan kehidupan manusia di dunia ini. Ada pun yang dimaksud penyempurnaan tujuan akhir yaitu akhirat (Dusuki dan Abdullah).

Dalam surah An Nisa ayat 85 yang artinya "sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntansi yaitu Allah SWT memerintahkan agar kita senantiasa dapat menjalankan amanah untuk semua pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (stakeholders) dan dalam hal ini kaitannya adalah memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan. Dan dalam kata lain ayat ini mendeskripsikan mengenai prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam perspektif syariah merupakan hubungan horizontal dan transendental sebagaimana dalam

surah Al- Anfal ayat 27 yang artinya “Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianatai amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya”

Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa selain harus menaati Allah dan Rasul-Nya, juga harus memberikan kepercayaan dengan memenuhi amanat yang telah diberikan. Dan salah satu implikasi dari memberikan kepercayaan yaitu dapat mempertanggungjawabkan (*accountability*) terhadap amanat yang telah diberikan. Satu ayat ini memuat tiga aspek yaitu Allah, Rasul dan orang-orang yang memberikan kepercayaan. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan akuntabilitas dalam pandangan islam berhubungan dengan hubungan interaksi transendental dengan Tuhan maupun hubungan interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Bentuk pertanggungjawaban harus diwujudkan dalam bentuk kinerja laporan keuangan dengan mengungkapkan dan menyajikan setiap materi informasi akuntansi yang dibutuhkan (*full disclosure*). Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan di entitas syariah.

III. Simpulan

Laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan tingkat akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas sebagai suatu pemberian informasi dan financial atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi suatu organisasi yang bersangkutan.

Konsep akuntabilitas berlandaskan maqashid syariah berarti bahwa akuntabilitas itu tidak hanya ditujukan kepada *stakeholders* tapi lebih jauh kepada Tuhan sebagaimana ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya akuntabilitas khususnya dalam perusahaan. Akuntabilitas yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan secara jujur dan sesuai realitas (*full disclosure*) serta tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain dengan berdasarkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntabilitas sehingga dengan demikian dapat tercipta keadilan dan kemashlahatan dapat tercapai.

Dalam realitasnya, implementasi akuntabilitas berlandaskan maqashid syariah belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan sekali pun itu berupa badan usaha islam. Hal itu dapat dilihat dari kecenderungan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi kebaikan-kebaikan perusahaan dan terkadang tidak memasukkan jika berkaitan dengan kekurangan perusahaan. Selain itu, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR pada bank syariah tidak selalu memerlukan kepada pengungkapan dalam laporan tahunan. Hal ini berarti bahwa pengungkapan tidak dilakukan secara penuh sehingga hak orang untuk memperoleh informasi jadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Abbasi, Kashif, dan Amna. 2010. *Islamic Leadership Model an Accountability Perspective. World Applied sciences Journal*. Vol. 9. No. 3 : Hal. 230-238

Anshori, Isa. 2009. Maqashid Syariah sebagai Landasan Etika Global. *Jurnal Hukum Islam:Kopertais Wilayah IV Surabaya*. Vol.1. No.1 : Hal. 14-20

Anymous. 2011. Laporan Nilai Tambah Syariah dalam Upaya Peningkatkan Akuntabilitas pada Laporan Keuangan Syariah. *Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia*
Diakses tanggal 7 Juni 2013 pukul 14.00 Wita

Baydoun, N. and Willet, R., (1997), *Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information, Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective*, Vol. 1 No. 1, pp.1-25

Djamhuri, Ali. 2011. Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Vol. 2. No. 1 : 147-185

Dusuki dan Abdullah. *Maqashid al- Shariah, Mashlahah, and Corporate Social responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 24. No.1

Fanani, Ahmad Zaenal. *Teori Keadilan dalam perspektif filsafata hukum dan islam*. Diakses pada tanggal 21 April 2013.

Halim, Julia dkk. 2005. "Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45". *Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI*

Harahap, S.S. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Prilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. Vol 15. No. 1

- Kurniawati, Elizabeth Penti. 2011. Tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Media Internet pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Proceeding PESAT*. Vol 4. ISSN 1858-2559 : Hal E109 - E114
- Maali, B., Casson, P. and Napier, C., (2006), "Social Reporting by Islamic Banks", *ABACUS*, Vol. 42 No. 2, pp: 266-289
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. Menggagas Neraca Syari'ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi 'Kekayaan Altruistik Islami". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 4, No. 2, Hal. 169-192
- Muthahhari, Murthada. 2001. *Mengenal Epistemologi: sebuah pembuktian terhadap rapuhnya pemikiran Asing dan kokohnya pemikiran Islam*. Terjemahan Muhammad Jawad Bafaqih. Lentera Baristama. Jakarta
- Permitasari, Nurhidayah Chairany dan Dewi, Nurul Hasanah Uswati. 2011. Pandangan Pemilik Badan Usaha terhadap Akuntabilitas dan Moralitas. *The Indonesian Accounting Review*. Vol. 1. No. 2 : Hal 135-144
- Ruslan, Muhammad. 2013. Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Hasanuddin
- Sulaiman, Maliah. 2003. Using the Hofstede-Gray framework to argue normatively for an extension of Islamic Corporate Reports. *Malaysian Accounting Review* Vol. 2 No. 1
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- . 2011. Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 2. No. 2. Hal 186-200
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2010. Aplikasi CSR pada Bank Syariah. Suatu Pendekatan Mashlahah dan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekbisi*. Vol. 4. No. 2 : Hal 98-115